

PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2019



Oleh :

**KASUBDIT KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN
PERSANDIAN**

Direktur SUPDaerah II, Ditjen Bina Pembangunan Daerah





OUTLINE

- 1 • LATAR BELAKANG RAKORTEK
- 2 • RENCANA PELAKSANAAN RAKORTEK 2019
- 3 • PELAKSANAAN RAKORTEK 2019
- 4 • PRIORTAS NASIONAL DAN RKPD TERKAIT KISP
- 5 • KEWENANGAN, PROGRAM DAN KEGIATAN KISP



DASAR HUKUM

Pasal 258 Ayat 3 & Pasal 259 UU Nomor 23 Tahun 2014

SINKRONISASI DAN HARMONISASI PEMBANGUNAN

Kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian berdasarkan pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 melakukan **sinkronisasi dan harmonisasi** dengan Daerah untuk **mencapai target pembangunan nasional**.



DILAKUKAN DALAM BENTUK KOORDINASI TEKNIS

Untuk **mencapai target pembangunan nasional** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 258 ayat (3) dilakukan **koordinasi teknis pembangunan** antara kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian dan Daerah.

PASAL 259 AYAT 1

ANTARA K/L DAN PEMDA PROVINSI DIKOORDINASIKAN OLEH MENDAGRI DAN MENPPN

Koordinasi teknis pembangunan antara kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian dan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Menteri dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan.

PASAL 259 AYAT 2

ANTARA PROVINSI DAN KAB/KOTA DIKOORDINASIKAN OLEH GUBERNUR

Koordinasi teknis pembangunan antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dan antar-Daerah kabupaten/kota lingkup Daerah provinsi dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

PASAL 259 AYAT 3

JENIS-JENIS KORTEK

Koordinasi teknis pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam tahap **perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan Daerah**.

PASAL 259 AYAT 4

COORDINASI KORTEK



RAPAT KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN

- **Kortekrenbang** merupakan bentuk pelaksanaan **sinkronisasi** dan **harmonisasi** perencanaan antara pusat dan daerah dalam pencapaian target pembangunan nasional
- **Target pembangunan nasional** merupakan kontribusi dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sehingga harus **dijabarkan** ke semua tingkat pemerintahan sesuai dengan kewenangan



TUJUAN RAKORTEK

- Penyelarasan **program, kegiatan, proyek, target, lokasi**, dan anggaran pembangunan nasional antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota
- Terwujudnya pencapaian target pembangunan nasional secara **sinergis** antara Pusat dan Daerah

OUTPUT RAKORTEK

- **Kesepakatan** antara pusat dan daerah terhadap program/kegiatan untuk pencapaian target pembangunan nasional.
- Bahan **input** bagi Pusat dalam penyempurnaan rancangan awal **RKP** dan sebagai bahan input bagi Daerah dalam penyempurnaan rancangan awal **RKPD**



FUNGSI FORUM RAKORTEK

- Melakukan **konfirmasi** terhadap program prioritas nasional, kesiapan lokasi dan target program prioritas
- Mengidentifikasi dan memastikan **dukungan daerah** dalam pencapaian target pembangunan yang menjadi prioritas nasional
- Mengidentifikasi dan memastikan **dukungan pusat** melalui APBN dalam pencapaian target pembangunan yang menjadi prioritas daerah



TINDAK LANJUT RAKORTEK

1. Pemerintah Pusat

- Penyempurnaan Program, Kegiatan, Proyek K/L, Lokasi dan Target dalam RKP
- Penyusunan Rancangan Awal Renja K/L
- Menjadi dasar pembahasan dalam Musrenbangnas

2. Pemerintah Daerah

- Penyempurnaan program, kegiatan, proyek daerah, lokasi dan anggaran daerah yang mendukung PN dalam Ranwal RKPD dan Ranwal Renja PD
- Menjadi dasar pembahasan dalam Kortek Provinsi dan Musrenbang Provinsi



MEKANISME PELAKSANAAN RAKORTEK TAHUN 2019

1. **Penyelenggaraan Rakortek Region I (Wilayah Barat) tanggal 25 Februari s.d. 1 Maret 2019**
Lokasi penyelenggaraan Rakortek Region I (Wilayah Barat) di Hotel Grand Inna, Kota Padang, Sumatera Barat.
2. **Penyelenggaraan Rakortek Region II (Wilayah Timur) tanggal 11 s.d. 15 Maret 2019**
Lokasi penyelenggaraan Rakortek Region II (Wilayah Timur) di Hotel Gran Senyur, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur.
3. **Peserta Rakortek:**
 - a. **Peserta Pusat** : Pejabat setingkat eselon I, II, III, IV di Kemendagri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kemenkominfo dan BPS.
 - b. **Peserta Daerah** : Kepala Bappeda Provinsi, dan seluruh Kepala Perangkat Daerah Provinsi
3. **Peranan di dalam Pelaksanaan Rakortek:**
 - a. **Kemendagri** : mengarahkan dan mengatur jalannya pembahasan, mulai dari time management, substansi pembahasan, kesepakatan pembahasan.
 - b. **K/L** : memberikan informasi dan masukan substansi terhadap proyek K/L dan proyek daerah yang diusulkan daerah.
 - c. **Bappenas** : memberikan justifikasi atas proyek K/L dan proyek daerah yang mendukung Prioritas Nasional.
 - d. **Pemerintah Daerah** : memberikan masukan terkait kebutuhan dan pembangunan di daerah; Urgensi proyek daerah dalam mendukung PN; Kesiapan lokasi dan rasionalisasi target proyek K/L.
 - e. **Notulen (Kemendagri & Bappenas)**



FORMAT PEMBAHASAN RAKORTEK 2019

A. Pada pelaksanaan Rakortek tahun ini, Kita akan mengisi 3 format, yaitu:

- a. Format 0 (target sasaran pembangunan nasional)
- b. Format 1 (Program/kegiatan dan proyek K/L yang mendukung Prioritas Nasional)
- c. Format 4 (Program/Kegiatan dan proyek K/L yang mendukung Prioritas Daerah)

B. Jadwal Pengisian Format Rakortek

- a. K/L mengisi sistem KRISNA mulai bulan November 2018 s.d. 13 Februari 2019.
- b. Daerah akan melakukan input aplikasi pada tanggal 14 s.d. 24 Februari 2019.
- c. Ditjen Bina Pembangunan Daerah melakukan verifikasi tanggal 14 s.d. 25 Februari 2019.

Masing-masing pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengisi format tersebut pada point A melalui Sistem Krisna RKP dan Krisna Selaras sesuai dengan periode waktu yang ditetapkan. Diharapkan K/L dan Pemda memperhatikan periode waktu tersebut di atas. Untuk penjelasan secara rinci mengenai pengisian sistem akan Disampaikan oleh Direktur PEIPD pada paparan berikutnya.

C. Tanggal 4-8 Februari 2019, Ditjen Bina Bangda dalam hal ini Direktorat PEIPD telah melakukan sosialisasi pelaksanaan Rakortek kepada Bappeda seluruh Indonesia di Jakarta.



PASCA RAKORTEK

1. Ditjen Bina Bangda melakukan rekap terhadap berita acara kesepakatan hasil Rakortek terkait:
 - a. Usulan daerah terhadap program dan kegiatan K/L
 - b. Program dan kegiatan daerah yang mendukung prioritas nasional
 - c. Program dan kegiatan daerah yang menjadi prioritas daerah

2. Ditjen Bina Bangda menyusun laporan hasil pelaksanaan Rakortek yang dikoordinasikan dengan Direktorat PEIPD, untuk disampaikan kepada Bappenas dan K/L terkait.



PRIORITAS NASIONAL TERKAIT KISP

- 1. PRIORITAS NASIONAL II: PENGUATAN KONEKTIVITAS**
(Infrastruktur Kemenkominfo terkait kewenangan Pusat)
- 2. PRIORITAS NASIONAL III : PENINGKATAN NILAI TAMBAH EKONOMI**
(Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kemenkominfo)
- 3. PRIORITAS NASIONAL V : STABILITAS KEAMANAN NASIONAL (Persandian, E-Government, Informasi dan Komunikasi Publik, KI, KPI)**

Keterkaitan STATISTIK dengan Prioritas Nasional (PN) ?

Mengenai PN akan dijelaskan oleh narasumber dari Bappenas dan penjelasan penajaman terhadap target pembangunan nasional tahun 2020 yang dijabarkan pada masing-masing provinsi dalam rancangan Renja K/L akan dijelaskan lebih lanjut oleh narasumber dari Kemenkominfo, BPS dan BSSN pada sesi pembagian ruang rapat per urusan setelah makan siang.



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

- Penyusunan Rancangan Awal RKPD Provinsi disusun berpedoman pada RPJMD Provinsi, RKP, Program Strategis Nasional dan **Pedoman Penyusunan RKPD**
- Penyusunan Rancangan Awal RKPD Kabupaten/Kota disusun berpedoman pada RPJMD Kabupaten/Kota, Rancangan Awal RKPD Provinsi, RKP, Program Strategis Nasional dan **Pedoman Penyusunan RKPD**
- Pedoman Penyusunan RKPD ditetapkan dengan Peraturan Menteri

(Pasal 75 & 76 Permendagri 86/2017)

► Yang selanjutnya secara detail akan dijelaskan oleh Direktur PEIPD lebih lanjut ◀



DRAFT RPP UPK PELAKSANAAN KEWENANGAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No.	PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	
	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA
a.	Penyediaan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi	Penyediaan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota
b.	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota
c.	Pelayanan hubungan komunikasi pemerintah daerah dan publik provinsi	Pelayanan hubungan komunikasi pemerintah daerah dan publik kabupaten/kota
d.	Pemberian dukungan pengelolaan komisi informasi provinsi dalam hal provinsi membentuk Komisi Informasi	Pemberian dukungan pengelolaan komisi informasi kabupaten/kota dalam hal kabupaten/kota membentuk Komisi Informasi.



DRAFT RPP UPK PELAKSANAAN KEWENANGAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No.	PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	
	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA
a.	Pendaftaran nama domain pemerintah provinsi	Pendaftaran nama domain pemerintah kabupaten/kota
b.	Penatalaksanaan dan pengawasan nama domain dan sub domain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi.	Penatalaksanaan dan pengawasan nama domain dan sub domain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota.
c.	penyediaan dan pengembangan sistem elektronik terintegrasi dan berbagi pakai dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.	Pemberian fasilitasi kepada pemerintah desa yang akan menggunakan nama domain desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
d.	-	Penyediaan dan pengembangan sistem elektronik terintegrasi dan berbagi pakai dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.



DRAFT RPP UPK PELAKSANAAN KEWENANGAN BIDANG STATISTIK

No.	PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI LINGKUP DAERAH	
	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA
a.	Koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral	Koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral
b.	Pengembangan mutu statistik daerah yang terintegrasi.	Pengembangan mutu statistik daerah yang terintegrasi.



DRAFT RPP UPK PELAKSANAAN KEWENANGAN BIDANG PERSANDIAN

No.	PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
a.	Penetapan kebijakan tata kelola keamanan informasi pemerintah daerah;
b.	Pelaksanaan analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan informasi pemerintah daerah
c.	pelaksanaan keamanan informasi pemerintahan daerah provinsi berbasis elektronik dan non elektronik; penyediaan layanan keamanan informasi pemerintah daerah provinsi
No.	PENETAPAN POLA HUBUNGAN KOMUNIKASI SANDI ANTAR PERANGKAT DAERAH
a.	Pelaksanaan analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya jaring komunikasi sandi pemerintah daerah provinsi;
b.	operasionalisasi jaring komunikasi sandi pemerintah daerah provinsi



PROGRAM DAN KEGIATAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No.	PROGRAM/KEGIATAN	
	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA
Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik		
1.	Penyusunan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Penyusunan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
2.	Pemantauan Opini dan Aspirasi Publik	Pemantauan Opini dan Aspirasi Publik
3.	Pengumpulan Data dan Informasi Kebijakan Pemerintah Daerah	Pengumpulan Data dan Informasi Kebijakan Pemerintah Daerah
4.	Penyusunan Agenda Komunikasi Pemerintah Daerah	Penyusunan Agenda Komunikasi Pemerintah Daerah
5.	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik
6.	Produksi Konten Informasi Publik	Produksi Konten Informasi Publik
7.	Penyediaan Informasi Publik dalam Rangka Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik	Penyediaan Informasi Publik dalam Rangka Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik



PROGRAM DAN KEGIATAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No.	PROGRAM/KEGIATAN	
	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA
Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik		
8.	Pelayanan Informasi Publik dalam Rangka Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik	Pelayanan Informasi Publik dalam Rangka Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik
9.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
10.	Penyebarluasan Informasi Publik melalui media	Penyebarluasan Informasi Publik melalui media
11.	Pengelolaan Media Komunikasi Milik Pemerintah	Pengelolaan Media Komunikasi Milik Pemerintah
12.	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas
13.	Penyelenggaraan Manajemen Krisis Komunikasi Publik	Penyelenggaraan Manajemen Krisis Komunikasi Publik
14.	Dukungan Administrasi Komisi Informasi dan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Dukungan Administrasi Komisi Informasi dan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik



PROGRAM DAN KEGIATAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No.	PROGRAM/KEGIATAN	
	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA
Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik		
15.	Koordinasi pelaksanaan Informasi dan Komunikasi Publik	Koordinasi pelaksanaan Informasi dan Komunikasi Publik
16.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika		
1	Layanan Nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan di lingkungan Pemerintah Daerah	Layanan Nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan di lingkungan Pemerintah Daerah
2	Integrasi Layanan Publik dan pemerintahan	Integrasi Layanan Publik dan pemerintahan
3	Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Umum dan Aplikasi Khusus yang Terintegrasi	Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Umum dan Aplikasi Khusus yang Terintegrasi
4	Pengembangan Sumberdaya TIK Pemerintah Daerah	Pengembangan sumberdaya TIK Pemerintah Daerah



PROGRAM DAN KEGIATAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No.	PROGRAM/KEGIATAN	
	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika		
5	Peningkatan SDM Pemerintah Daerah Dalam Penggunaan Aplikasi Elektronik	Peningkatan SDM Pemerintah Daerah Dalam Penggunaan Aplikasi Elektronik
6.	Penyelenggaraan Ekosistem TIK dan Kerjasama <i>Smart Province</i>	Peningkatan SDM Masyarakat Pengguna Layanan Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkup Kabupaten/Kota
7	Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO)	Penyelenggaraan Ekosistem TIK dan Kerjasama <i>Smart City</i>
8	Penyusunan Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Nama Domain dan e-Government (SPBE)	Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO)
9	Layanan Akses Internet, Intranet dan Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Penyusunan Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Nama Domain dan e-Government (SPBE)
10	Layanan Manajemen Data dan Informasi Elektronik Pemerintah Daerah	Layanan Akses Internet, Intranet dan Komunikasi Intra Pemerintah Daerah



PROGRAM DAN KEGIATAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No.	PROGRAM/KEGIATAN	
	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika		
11	Layanan Infrastruktur Dasar <i>Data Center</i> , <i>Disaster Recovery Center</i> dan TIK	Layanan Manajemen Data dan Informasi Elektronik Pemerintah Daerah
12.	Layanan website lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Pemerintah Daerah	Layanan Infrastruktur Dasar <i>Data Center</i> , <i>Disaster Recovery Center</i> dan TIK
13.	Promosi dan Sosialisasi Layanan Publik Berbasis Elektronik	Layanan website lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Pemerintah Daerah
14.	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	Promosi dan Sosialisasi Layanan Publik Berbasis Elektronik
15	-	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan



PROGRAM DAN KEGIATAN BIDANG STATISTIK

No.	PROGRAM/KEGIATAN	
	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA
Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah		
1.	Pengumpulan Data Statistik Sektoral	Pengumpulan Data Statistik Sektoral
2.	Pengolahan Data Statistik Sektoral	Pengolahan Data Statistik Sektoral
3.	Analisis Data Statistik Sektoral	Analisis Data Statistik Sektoral
4.	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Membangun Metadata Statistik Sektoral
5.	Diseminasi Data Statistik Sektoral	Diseminasi Data Statistik Sektoral
6.	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral
7.	Pengembangan Infrastruktur	Pengembangan Infrastruktur
8.	Koordinasi Statistik Sektoral	Koordinasi Statistik Sektoral
9.	Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi
10.	Supervisi Statistik Sektoral ke Kabupaten/Kota	



PROGRAM DAN KEGIATAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN

No.	PROGRAM/KEGIATAN	
	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA
Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah		
1.	Penyusunan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi	Penyusunan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi
2.	Penerapan Sistem Manajemen Pengamanan Informasi	Penerapan Sistem Manajemen Pengamanan Informasi
3.	Literasi Keamanan Informasi Pemerintah Daerah dan Publik	Literasi Keamanan Informasi Pemerintah Daerah dan Publik
4.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah Daerah di Bidang Keamanan Informasi	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah Daerah di Bidang Keamanan Informasi
5.	Pemberian Tunjangan Khusus Pengamanan Persandian dan Tunjangan Fungsional Tertentu di Bidang Persandian	Pemberian Tunjangan Khusus Pengamanan Persandian dan Tunjangan Fungsional Tertentu di Bidang Persandian
6.	Pengembangan Layanan Keamanan Informasi	Pengembangan Layanan Keamanan Informasi



PROGRAM DAN KEGIATAN BIDANG PERSANDIAN

No.	PROGRAM/KEGIATAN	
	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA
Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah		
7.	Peningkatan Kapasitas Teknologi Kemanan Informasi	Peningkatan Kapasitas Teknologi Kemanan Informasi
8.	Penyelenggaraan Jaring Komunikasi Sandi	Penyelenggaraan Jaring Komunikasi Sandi
9.	Koordinasi Dalam Rangka Pengamanan Informasi	Koordinasi Dalam Rangka Pengamanan Informasi
10.	Audit Keamanan Informasi	Audit Keamanan Informasi
11.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Di Bidang Keamanan Informasi	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Di Bidang Keamanan Informasi



**==== Terima
kasih ====**